



Peran UNIFIL dalam Menjaga Stabilitas Kawasan Perbatasan di Wilayah Garis Biru Lebanon-Israel

Nabilaturramadhani^{1*}, Imam Fadhil Nugraha²

^{1,2} Universitas Hasanuddin, Indonesia

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Kota Makassar

Korespondensi penulis: n4bila2005@gmail.com*

Abstract. *The United Nations Security Council established the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) at the request of the Lebanese Government due to Israeli aggression in 1978 in accordance to mandate of Resolutions 425 and 426. In the period 2024–2025, UNIFIL's effectiveness is again in the spotlight as escalation of the conflict increases, including the violation of the 60-day ceasefire by Israel, which has caused new tensions in the border area. This article examines the mechanisms, roles and effectiveness of UNIFIL as an international organization in efforts to realize peace in the Blue Line Region. Using the three realistic approaches to peace with the use of qualitative approach based on the latest articles, journals, and news articles. The study shows that limited geopolitical pressure and inability to directly engage in the conflict have hampered UNIFIL's performance, although its presence continues to play a role in preventing large-scale conflict. So the UNSC emphasizes the fulfillment of the 1701 mandate through communication and negotiation between UNIFIL and Lebanon-Israel for peace on both sides.*

Keywords: *Israel; Lebanon; Peacekeeping; UNIFIL*

Abstrak. Dewan Keamanan PBB membentuk Pasukan Interim PBB di Lebanon (UNIFIL) atas keinginan Pemerintah Lebanon akibat agresi Israel di 1978 sesuai dengan mandat Resolusi 425 dan 426. Pada periode 2024–2025, efektivitas UNIFIL kembali menjadi sorotan seiring meningkatnya eskalasi konflik, termasuk pelanggaran gencatan senjata 60 hari oleh pihak Israel, yang menyebabkan ketegangan baru di wilayah perbatasan. Tulisan ini mengurai tentang bagaimana mekanisme maupun peran dan efektivitas dari UNIFIL sebagai organisasi internasional dalam upaya mewujudkan perdamaian di Wilayah Garis Biru. Menggunakan pendekatan *three realistic approaches to peace* dengan penggunaan pendekatan kualitatif berbasis artikel, jurnal, dan *news article* terkini. Kajian menunjukkan bahwa keterbatasan dan tekanan geopolitik dan ketidakmampuan untuk terlibat langsung dalam konflik telah menghambat kinerja UNIFIL, meskipun kehadirannya tetap berperan dalam mencegah konflik berskala besar. Sehingga DK PBB menekankan terpenuhinya mandat 1701 melalui komunikasi dan negosiasi antara UNIFIL dan Lebanon-Israel untuk perdamaian kedua belah pihak.

Kata kunci: Israel; Lebanon; Penjagaan perdamaian; UNIFIL

1. LATAR BELAKANG

Sejarah konflik Lebanon - Israel dimulai pada bulan Juni 1967, ketika Perang Enam hari berlangsung antara Negara Israel dan tiga negara Arab, yaitu Mesir, Yordania, dan Suriah (Hadi, 2021) Secara psikologis, perang tersebut menciptakan rasa superioritas dan kekebalan dalam kepemimpinan Israel, eselon militer, dan pikiran publik. Dalam waktu enam hari, pasukan Mesir, Suriah, Yordania, dan Irak dikalahkan secara telak. Serangan militer tersebut berdampak pada wilayah Lebanon Selatan dan Palestina yang berbatasan langsung dengan Israel. Tahun 1968, kelompok militan *Palestine Liberation Operation* (PLO) dan kelompok Palestina lainnya mendirikan Negara Kuasi di Lebanon Selatan.

PLO menggunakannya sebagai pangkalan untuk melakukan serangan ke Israel Utara. Israel menanggapi serangan Palestina dari Lebanon dengan menginvasi Lebanon hingga ke

bagian utara Sungai Litani. Pemerintahan Lebanon mengeluarkan pernyataan resmi yang memprotes keras serangan Israel ke Lebanon di hadapan Dewan Keamanan PBB. Sebagai tanggapan atas invasi tersebut, tanggal 19 Maret 1978 DK PBB mengadopsi Resolusi 425 dan Resolusi 426 yang menyerukan penarikan pasukan Israel dari Lebanon dan membentuk Pasukan Interim PBB di Lebanon atau *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL) untuk menegakkan mandat ini.

UNIFIL kemudian di posisikan di wilayah perbatasan antara Lebanon dan Israel yang disebut Garis Biru yang membentang dari Sungai Litani hingga perbatasan di Lebanon Selatan dengan panjang 120 km dan dibuat oleh PBB sebagai garis demarkasi yang memisahkan Lebanon dari Israel (UNIFIL, FAQs, 2025). Garis Biru merupakan garis penarikan sementara yang dipantau oleh UNIFIL, dimana tujuan garis tersebut adalah untuk memastikan bahwa *Israel Defence Force* (IDF) menarik kembali pasukan mereka dari wilayah Lebanon. Selain itu, UNIFIL dimandatkan untuk mendukung *Lebanese Armed Forces* (LAF) saat mengerahkan mereka di sepanjang Garis Biru dan membantu Pemerintah Lebanon dalam mengamankan titik masuk ke wilayah mereka tanpa mengambil kendali hak Lebanon untuk memerintah.

Ketika konflik bersenjata kembali muncul di tahun 2006, mandat tersebut diperbarui kembali ketika para pejuang Hizbullah menculik dua anggota pasukan Israel. Serangan itu telah melewati Garis Biru hingga akhirnya PBB menerbitkan Resolusi 1701, dimana UNIFIL ditugaskan untuk memantau Garis Biru melalui koordinasi dan patroli, kemudian melaporkan semua pelanggaran yang terjadi kepada *Security Council*. Resolusi tersebut sepenuhnya bertujuan mengakhiri permusuhan antara Israel dan pasukan Hizbullah, dan pasukan UNIFIL dapat menarik tentara Israel dari Lebanon Selatan. Resolusi ini juga dimandatkan agar kedua belah pihak menghormati penuh terhadap Garis Biru, termasuk wilayah bebas personel bersenjata dan mencegah dimulainya kembali permusuhan.

Namun konflik kembali berkejolak pada tanggal 28 Agustus 2024, dimana Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang memperbarui mandat pasukan penjaga perdamaian PBB, Pasukan Pemelihara Perdamaian (UNIFIL), di Lebanon Selatan hingga 31 Agustus 2025. Tetapi pertempuran lintas perbatasan antara gerakan Syiah Lebanon Hizbullah dan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) tidak terpengaruh oleh pembaruan mandat tersebut. Sehingga serangan Israel di Lebanon telah menewaskan sedikitnya 3.102 orang dan melukai 13.819 orang menurut data Kementerian Kesehatan Lebanon. Pada 10 Oktober 2024, Israel juga menyerang pasukan UNIFIL yang berada di wilayah Garis Biru yang neutral (Al Jazeera, 2024).

Meskipun dengan perbaruan mandat, konflik antara Israel dan Lebanon semakin menjadi pelik dengan adanya banyak korban sipil yang berjatuhan, ditambah lagi dengan

pasukan UNIFIL yang juga menjadi sasaran dari salah satu lawan pihak. Pada tanggal 22 Maret 2025, Israel melanggar perjanjian gencatan senjata antara Lebanon-Israel selama 60 hari yang telah di sahkan tanggal 27 November 2024 dengan alasan bahwa Hezbollah menembakkan roket ke wilayah Israel, meskipun dengan desakan UNIFIL untuk menarik pasukan mereka dari lima wilayah Lebanon yang telah dikuasai (Difa, 2025). UNIFIL tetap berada di posisi perbatasan antara Israel-Lebanon untuk mengawasi eskalasi konflik.

Tulisan ini kemudian berupaya untuk mengurai pembahasan terkait tentang bagaimana mekanisme maupun peran dari UNIFIL sebagai organisasi internasional dalam upaya mewujudkan perdamaian di Wilayah Garis Biru sehingga efektivitas peran UNIFIL yang masih perlu diteliti lebih dalam karena operasi ini berlanjut sampai sekarang. Misi pemelihara perdamaian UNIFIL terhadap konflik Lebanon-Israel masih perlu diteliti lebih mendalam untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana efektifitas peran UNIFIL dalam mengelola dan meredam konflik di wilayah perbatasan Garis Biru, khususnya setelah perjanjian gencatan senjata telah dikeluarkan, konflik masih berkepanjangan sampai sekarang.

2. KAJIAN TEORITIS

Tulisan ini diawali dengan melihat dinamika yang terjadi di kawasan perbatasan Garis Biru Lebanon-Israel dan bagaimana UN memaksimalkan peranannya melalui kerangka UNIFIL. Dalam mengkaji topik tersebut dapat dipetakan tiga pendekatan yang memiliki relevansi dalam memaksimalkan peran UNIFIL. Maka digunakan tiga pendekatan *approach to peace* menurut Johan Galtung. Terdapat tiga pendekatan untuk mencapai perdamaian: *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding*. *Peacekeeping* adalah pendekatan disosiatif dengan memisahkan pihak-pihak yang bertikai secara fisik atau struktural, sebagai cara untuk menghentikan kekerasan langsung dalam jangka pendek (Galtung, Three realistic approaches to peace: peacekeeping, peacemaking, peacebuilding, 1976).

Peacemaking berkaitan dengan pencarian solusi melalui negosiasi antara dua pihak yang berkonflik melalui pendekatan orang ketiga dengan membangun jembatan antara kelompok yang bertikai. *Peacebuilding* adalah proses pembentukan perdamaian melalui pembangunan dari berbagai bidang dan untuk menciptakan perdamaian yang abadi dan berkelanjutan (Galtung, Three realistic approaches to peace: peacekeeping, peacemaking, peacebuilding, 1976). *Peacekeeping operation* menurut buku *The Blue Helmets: Review of UN Peacekeeping*, adalah operasi personel militer yang dibentuk oleh DK PBB agar ketegangan berakhir dan menciptakan suasana damai di wilayah-wilayah berkonflik. PKO ditugaskan

untuk menyelesaikan konflik dengan menggunakan sarana-sarana perdamaian seperti negosiasi dan lain-lain sesuai dengan Bab VI dan VII Piagam PBB.

Keberadaan pihak ketiga menurut Galtung memiliki peran yang penting, mulai dari tahap *peacekeeping* dimana biasanya hadir sebagai pasukan perdamaian. Pihak ketiga berperan sebagai penyangga pihak-pihak berkonflik. Sehingga ketika konflik telah diredam, tahap *peacemaking* dimulai dengan membuka jalur komunikasi antara pihak-pihak berkonflik melalui pendekatan empatik dan tidak memaksa, agar kedua belah pihak bisa menemukan solusi yang adil. Masuk ke tahap paling mendalam adalah *peacebuilding* dimana akar-akar permasalahan yang menopang konflik telah hilang untuk membangun perdamaian jangka panjang, Galtung juga menekankan bahwa pihak ketiga tidaklah bersifat dominan tetapi sebagai fasilitator dan penjaga netralitas.

Dengan adanya eksistensi dari UNIFIL yang memungkinkan untuk tercipta kerangka perdamaian dalam Upaya menangani konflik Lebanon-Israel *three realistic approach to peace* dengan tujuan *peacekeeping operation* UNIFIL dibentuk. Konflik yang berkepanjangan antara Lebanon Selatan dan Israel yang melibatkan berbagai kelompok bersenjata dan krisis kemanusiaan. Pembentukan UNIFIL sebagai misi pemelihara perdamaian PBB memiliki tugas utama, yaitu mencegah pelanggaran di sepanjang perbatasan antara Lebanon dan Israel yaitu Garis Biru; melalui negosiasi, usulan, saran dan serangkaian tindakan sebagai sarana mengakhiri konflik; dan menegakkan mandate-mandate yang telah ditetapkan oleh DK PBB.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui kalimat atau tulisan yang menjelaskan secara rinci mengenai topik yang untuk mengetahui lebih jelas peran UNIFIL mulai dari tujuan terbentuknya hingga keefektifan dan tugas dari militer tersebut dalam konflik Lebanon-Israel. Moleong mengatakan bahwa metode kualitatif merupakan cara untuk mendapatkan data-data secara deskriptif berbentuk lisan maupun tertulis dari objek yang ingin diteliti (Wada, 2024, p. 3). Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen, seperti buku, artikel, jurnal, dan *news article* melalui internet yang relevan dengan rumusan masalah penelitian (Faesal, 2024, pp. 137-138). Penulis mengakses beberapa jurnal yang berisikan latar belakang pembentukan UNIFIL untuk mengatasi konflik ini hingga ke peran operasi perdamaian, dan berita-berita digital yang mendokumentasi peran UNIFIL dalam menjaga stabilitas kawasan regional di perbatasan Lebanon Selatan – Israel di periode 2024-2025.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Serangan militer Israel berdampak pada wilayah Lebanon Selatan dan Palestina yang berbatasan langsung dengan Israel. Ribuan pengungsi Palestina ketakutan dan melarikan diri dari Palestina dan menjadikan Lebanon sebagai tempat penampungan. Ketika pengungsi Palestina mendirikan PLO, kelompok Palestina lainnya mendirikan negara kuasi di Lebanon selatan dan menggunakannya sebagai pangkalan untuk melakukan serangan ke Israel utara. Militan Palestina kemudian mengalihkan fokus serangannya ke Israel, dan kerap melakukan serangan itu melalui perbatasan Israel-Lebanon. Israel menanggapi serangan Palestina dari Lebanon dengan serangan udara yang luas terhadap pangkalan operasi PLO.

Hal ini merupakan respons terhadap pembantaian *Coastal Road* dekat Tel Aviv oleh militan Palestina yang berpusat di Lebanon. Konflik tersebut mengakibatkan kematian ribuan warga Lebanon dan Palestina, 20 warga Israel, dan gelombang pengungsian internal di Lebanon. Pasukan Pertahanan Israel memperoleh kemenangan militer melawan PLO dan PLO dipaksa mundur dari Lebanon Selatan, mencegahnya melancarkan serangan terhadap Israel dari seberang perbatasan daratnya dengan Lebanon. Dari sinilah konflik antara Lebanon dan Israel dimulai,

Pembentukan dan Mandat Awal UNIFIL

Pada tanggal 19 Maret 1978, DK PBB membentuk Pasukan Interim PBB di Lebanon atau *United Nations Interim Force in Lebanon*. Dalam resolusi tersebut, UNIFIL dimandatkan ke Lebanon dengan tiga tujuan, yaitu: memastikan pasukan Israel mundur dari perbatasan, pemulihan perdamaian dan keamanan internasional, serta membantu pemulihan otoritas pemerintah Lebanon pada wilayah tersebut. Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi 425 atas permintaan Amerika Serikat, yang meminta penghormatan ketat terhadap kedaulatan dan kemerdekaan politik Lebanon di luar batas-batas yang diakui secara internasional. Dewan meminta Israel menghentikan segera tindakan militernya yang mengancam integritas teritorial Lebanon dan menarik pasukannya dari seluruh wilayah tersebut.

UNIFIL telah bertugas selama 28 tahun terhitung sejak 1978 hingga 2006. Namun, konflik bersenjata kembali muncul di tahun 2006. Para pejuang Hizbullah menculik dua anggota pasukan Israel. Penculikan tersebut meningkatkan ketegangan di kawasan perbatasan. Saling serang tidak terelakkan antara IDF dengan demiliterisasi Hizbullah. Serangan itu bahkan melewati Garis Biru yang merupakan mandate PBB. Hizbullah menyerang basis-basis pasukan IDF dan kota-kota Israel di Selatan Garis Biru. Pihak Israel membalas serangan Hizbullah dengan Operasi Balasan yang Adil dan kemudian menjadi Operasi Perubahan Arah.

Israel menembakkan roket tertuju ke wilayah Lebanon yang dilakukan oleh *Israeli Air Force*, blokade laut dan melancarkan serangan ke dalam wilayah Lebanon Selatan oleh tentara IDF. Akhirnya PBB menerbitkan Resolusi 1701. Penjelasan dari resolusi tersebut adalah memastikan pemerintah Lebanon dapat menjamin keamanan di wilayah perbatasan dan memantau lebih dekat pos-pos di perlintasan perbatasan di seluruh wilayah Lebanon. Resolusi tersebut sepenuhnya bertujuan mengakhiri permusuhan antara Israel dan pasukan Hizbullah, dan pasukan UNIFIL dapat menarik tentara Israel di Lebanon Selatan (Ernes, 2024).

Pada tanggal 24 Agustus 2024, DK PBB memperpanjang mandat Pasukan UNIFIL hingga 31 Agustus 2025, dengan menekankan pentingnya perdamaian yang menyeluruh, dan abadi di Timur Tengah. Dengan suara bulat, Dewan juga menuntut implementasi penuh resolusi 1701 (2006) dan mendesak semua aktor untuk segera menerapkan langkah-langkah yang bertujuan untuk memstabilisasi situasi di Garis Biru. Lebih lanjut, badan yang beranggotakan 15 orang itu mendorong Sekretaris Jenderal untuk memastikan bahwa Pasukan tetap siap untuk menyesuaikan kegiatannya guna mendukung de-eskalasi dan meminta pelaporan berkelanjutan tentang implementasi resolusi 1701 (2006) setiap empat bulan (UN, 2024).

Garis Biru sebagai Mekanisme Penyangga Perdamaian

Garis Biru merupakan kunci perdamaian di wilayah tersebut, namun garis ini bukan garis perbatasan, melainkan garis penarikan. Garis Biru membentang dari Sungai Litani hingga perbatasan di Lebanon Selatan dengan cakupan luas 1.060 km persegi dan membentang sepanjang 120 km. Dibuat oleh PBB sebagai garis penarikan pasukan lawan yang memisahkan Lebanon untuk menarik pasukan Israel dari Lebanon Selatan dimana garis penarikan ini akan selalu bersifat sementara. Setiap kali otoritas Lebanon atau Israel ingin melakukan kegiatan di dekat Garis Biru, meskipun itu adalah untuk tujuan keamanan, mereka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pasukan UNIFIL.

Sehingga hal ini memudahkan UNIFIL untuk meminimalisir kesalahpahaman yang dapat menyebabkan peningkatan ketegangan antara dua pihak. Pada tahun 2007, UNIFIL telah berkolaborasi dengan semua pihak untuk memasang penanda visual yang dikenal sebagai "*Blue Barrels*." Masing-masing dari 272 *blue barrels* ini dipasang setelah inspeksi kompleks dan persetujuan kedua belah pihak (Col, 2021). UNIFIL bersama dengan LAF melakukan patroli jalan kaki atau kendaraan sementara sisanya dilakukan secara independen. UNIFIL juga melakukan pembersihan persenjataan yang tidak sah. Hasilnya lebih dari 100 gudang senjata

milik Hizbullah atau kelompok bersenjata lainnya ditemukan dan dimusnakan sejak 27 November 2024 (Security Council Report, 2025).

Peran UNIFIL Dalam Penyelesaian Konflik Lebanon-Israel

UNIFIL ditugaskan untuk memulihkan keamanan dan perdamaian di seluruh dunia serta membantu Pemerintah Lebanon dalam menjamin bahwa otoritasnya di wilayah tersebut kembali kuat. Mereka harus mempertahankan tugasnya di wilayah perbatasan sesuai dengan tugas yang diberikan kepada mereka. UNIFIL memantau dan memastikan bahwa pertempuran tidak terjadi lagi di daerah tersebut dan bahwa wilayah operasinya tidak digunakan untuk kegiatan permusuhan. Pertama, tentara akan memastikan bahwa pasukan Israel telah dipindahkan dari wilayah Lebanon ke perbatasan internasional. Setelah ini selesai, suatu area operasi akan dibentuk dan dipertahankan, yang akan ditentukan dengan melibatkan semua pihak terkait.

Mereka akan bertanggung jawab untuk menghentikan permusuhan, memastikan wilayah operasi tetap damai, mengontrol gerakan, dan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan pemulihan penuh kedaulatan Lebanon. Sekretaris Jenderal juga menyatakan bahwa untuk memungkinkan UNIFIL melaksanakan resolusi Dewan Keamanan dengan lebih mudah, perlu menetapkan pengaturan dengan Israel dan Lebanon. Dimana diharapkan kedua negara akan bekerja sama sepenuhnya dengan UNIFIL dalam hal ini.

UNIFIL tidak boleh menggunakan kekerasan dan tidak boleh mengganggu urusan internal kedua negara. Seperti operasi penjaga perdamaian PBB lainnya, UNIFIL tidak boleh mengambil tanggung jawab atas negara tempat ia beroperasi; oleh karena itu, seperti operasi penjaga perdamaian lainnya, kekerasan tidak diperbolehkan untuk digunakan kecuali untuk membela diri, yang mencakup perlawanan atau gangguan dalam menjalankan tugasnya. Pencegahan diperlukan agar UNIFIL dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan mandat Dewan.

Negosiasi PBB dengan Lebanon dan Israel

UNIFIL bersama Kedutaan Besar AS dan Prancis di Lebanon, bertemu dengan LAF dan IDF pada tanggal 9 Desember 2024 di Naqoura. Dimana telah dikeluarkan pernyataan untuk mengkoordinasi jalannya Resolusi Dewan Keamanan 1701. Perjanjian gencatan senjata akhirnya ditandatangani oleh Israel dan Hizbullah, yang mengharuskan pasukan Israel mundur dari Lebanon Selatan dalam waktu 60 hari, dan para pejuang Hizbullah harus kembali ke utara

Sungai Litani. UNIFIL dan LAF ditugaskan untuk memantau kedua belah pihak untuk menepati resolusi tersebut yang dimulai tanggal 27 November 2024.

UN Secretary-General António Guterres tiba di Beirut dan menekankan kembali betapa pentingnya untuk menerapkan Resolusi 1701 secara menyeluruh, bahwa wilayah antara Garis Biru dan Sungai Litani harus bebas dari senjata apa pun kecuali yang dimiliki oleh Pemerintah Lebanon dan UNIFIL. Guterres menyatakan bahwa penting bagi negara untuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon, dan bahwa negara harus memiliki kendali penuh atas persenjataan di seluruh wilayahnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Lebanon dan UNIFIL berkomitmen untuk membantu pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan resolusi 1701 dan memastikan bahwa penghentian konflik tetap berlaku (United Nations, 2024).

Wakil Sekretaris Jenderal untuk Operasi Perdamaian, Jean-Pierre Lacroix mengatakan bahwa otoritas Lebanon berkomitmen untuk menegakkan komitmen mereka berdasarkan perjanjian tersebut dan resolusi Dewan 1701. Kepala Misi *United Nations Truce Supervision Organization* (UNTSO) dan Komandan Pasukan *United Nations Disengagement Observer Force* (UNDOF), Patrick Gauchat melaporkan bahwa UNDOF telah memberi tahu Israel bahwa kehadiran dan tindakannya di area tersebut melanggar Perjanjian 1974. Namun, IDF tetap berada di area pemisahan tersebut. Para delegasi dari beberapa negara juga menghighlight urgensi dari *ceasefire* ini, dan juga rapuhnya harapan tersebut.

Panama dan Guyana meminta Dewan untuk memberikan dukungan penuh berbentuk dukungan finansial dan politik terhadap Operasi Perdamaian. Rusia menyoroti sikap Israel yang tidak acuh terhadap perjanjian ini. Dimana saat Lebanon telah menegaskan komitmennya untuk menghormati perjanjian gencatan senjata, Israel terus melanggarnya. Pelanggaran berulang ini merupakan "ancaman besar" bagi upaya internasional untuk menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut. Menekankan bahwa UNIFIL dan UNDOF harus belajar dari kegagalan mereka dan memastikan bahwa mandat mereka dilaksanakan dengan kuat (United Nations, 2025).

Efektivitas UNIFIL dalam Pengelolaan konflik Lebanon-Israel

UNIFIL, seperti semua operasi penjaga perdamaian PBB lainnya, penting untuk menghindari penggunaan kekerasan sebagai bentuk pertahanan. Militer tidak diperbolehkan terlibat dalam genosida untuk mencapai tujuannya. Kekuatan mereka sangat terbatas dan hanya dipersenjatai senjata pertahanan kecil. Karena alasan ini, selama pembentukan tentara, beberapa kondisi penting ditentukan, yaitu mengharuskan pasukan tersebut bekerja sama

dengan semua pihak yang terkait dan mendapatkan dukungan dan kepercayaan penuh dari Dewan Keamanan. Dengan hal ini, asumsinya adalah para pihak akan mematuhi keputusan Dewan Keamanan tanpa ada hambatan. Namun, UNIFIL menghadapi kerja sama yang tidak memadai selama kehadirannya, yang menyebabkan pelaksanaan mandat dipenuhi dengan tantangan.

Keberhasilan UNIFIL sebagai lembaga internasional dalam menyelesaikan konflik diukur melalui kemampuannya untuk mengurangi skala dan intensitas permusuhan langsung antara Israel dan Hizbullah sejak diadopsinya Resolusi 1701. Resolusi ini menyerukan Israel untuk menarik pasukannya dari Lebanon dan menyerakan wilayah tersebut kepada Lebanon dan LAF; menegaskan kedaulatan Lebanon; dan pelucutan senjata terhadap anggota bersenjata non-negara seperti Hizbullah. Perang skala besar tidak terjadi di wilayah tersebut pasca resolusi ini disahkan, namun perdamaian masih kurang stabil.

Pada tanggal 28 Agustus 2024, DK PBB mengeluarkan resolusi 2749. Resolusi tersebut memperbarui mandat Pasukan pemelihara perdamaian (UNIFIL) – pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon Selatan hingga 31 Agustus 2025. Namun, pembaruan mandat tidak memiliki pengaruh terhadap pertempuran lintas perbatasan antara gerakan Hizbullah dan IDF, yang telah ditandai dengan baku tembak hampir setiap hari sejak Oktober 2023. Jumlah korban tewas di Negara Lebanon akibat serangan udara Israel terus meningkat.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Lebanon pada tahun 2024, serangan Israel di Lebanon telah menewaskan sedikitnya 3.102 orang dan melukai 13.819 orang. Lima anggota UNIFIL dari Malaysia, dua TNI, tiga tentara Lebanon, dan tiga warga sipil Lebanon termasuk di antara yang terluka setelah serangan Israel di kota utama Lebanon Selatan, Sidon (Al Jazeera, 2024). UNIFIL membalas serangan yang dilakukan oleh Israel sebagai “perusakan yang disengaja dan langsung terhadap properti UNIFIL yang dapat diidentifikasi dengan jelas merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan resolusi 1701” (Al Jazeera, 2024).

Namun sejak 30 September, Israel menuntut Pasukan UNIFIL untuk meninggalkan lokasi yang ditetapkan secara internasional. Ini dilakukan agar Israel dapat melakukan invasi darat ke Lebanon Selatan dengan lebih mudah. Sejak awal Oktober 2024, Israel telah menyerang UNIFIL sebanyak 30 kali dalam upaya untuk meninggalkan wilayah yang dijaga. Pada tanggal 27 November 2024, gencatan senjata selama enam puluh hari dimulai antara Israel dan Hizbullah, namun, pada 22 Maret, Israel melanggar perjanjian karena mengira Hezbollah menembakkan roket ke wilayah mereka.

IDF sekali lagi diingatkan tentang kewajiban mereka untuk menjaga keselamatan dan keamanan anggota dan aset PBB. Meskipun ada hambatan, UNIFIL tetap berada di posisi Garis Biru untuk menjaga keamanan, dan ketika roket ditembakkan dari utara markas UNIFIL, kemungkinan oleh Hizbullah atau kelompok yang berafiliasi, sehingga UNIFIL melakukan penyelidikan (UNIFIL, 2024). Setelah itu, banyak orang mempertanyakan keberadaan UNIFIL di Lebanon, meskipun seharusnya melindungi penduduk sipil dan tugas untuk memastikan perdamaian tercapai di wilayah tersebut.

Beberapa alasan utama yang menyebabkan keterbatasan aksi adalah UNIFIL tidak diizinkan untuk menggunakan kekerasan dan aktivitas mereka dibatasi hanya pada patroli rutin di Garis Biru. Selama mereka berada di sana, mereka tidak pernah menembak Israel langsung ketika mereka agresif terhadap Lebanon. Dan kekuatan Hizbullah juga telah mengakar kuat dalam sistem politik Lebanon, sehingga mempersulit UNIFIL untuk mengambil tindakan ke Hizbullah. Peran UNIFIL di Lebanon Selatan juga dibentuk oleh konteks konflik Arab-Israel lebih luas yang jauh melampaui cakupan mandat UNIFIL. Dalam konflik yang luas ini, Hizbullah melihat dirinya sebagai bagian dari gerakan yang menentang pendudukan Israel atas wilayah Arab.

PBB kemudian menyadari bahwa mandat UNIFIL selama ini menghadapi tantangan, mereka mulai mengusulkan sejumlah langkah konkret guna membuat pelaksanaan mandat lebih efektif. Italia terutama menyuarakan untuk menyesuaikan kembali *rules of engagement* dimana berpendapat UNIFIL tidak boleh hanya bersikap pasif, dan Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, secara terbuka menyatakan UNIFIL harus diperkuat agar mereka memiliki kewenangan untuk melindungi diri sendiri dan juga sipil secara lebih aktif mengingat beberapa insiden dimana personel UNIFIL menjadi sasaran oleh pihak bersenjata yang berkonflik (Ansa English Desk, 2024).

Perlu ditekankan selama kehadiran UNIFIL di Lebanon Selatan, wilayah di sepanjang Garis Biru tidak mengalami perang skala besar selama hampir dua dekade. Ketenangan relatif ini merupakan hasil langsung dari kehadiran UNIFIL dan patroli berkelanjutannya. Pelaporan dan pemantauan rutin atas pelanggaran gencatan senjata memberikan transparansi dan pengaruh diplomatik bagi PBB dan negara-negara anggotanya untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi. UNIFIL juga telah memainkan peran pendukung dalam memperkuat kapasitas LAF melalui patroli bersama dan koordinasi operasional dalam memperkuat kedaulatan Lebanon, setidaknya secara simbolis, di wilayah Selatan (United Nations, 2024).

Dalam ranah sipil, UNIFIL telah memberikan bantuan kemanusiaan dan mendukung masyarakat lokal di Lebanon Selatan. Salah satu bentuk kontribusi paling signifikan adalah

lewat *Quick Impact Projects* (QIP). Proyek-proyek kecil tapi cepat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat; seperti memperbaiki sekolah, menyediakan air bersih, dan meningkatkan jalan lokal. Sejak Oktober 2023 UNIFIL telah membangun puluhan proyek energi surya yang meliputi penerangan jalan umum, penerangan sekolah, dan fasilitas militer lokal seperti di kampus Universitas Lebanon di Tyre dan barak LAF di Bint Jbeil. Meskipun berskala kecil, bantuan ini telah membangun hubungan baik antara UNIFIL dan penduduk setempat.

Keberadaan UNIFIL di wilayah tersebut memberikan semacam "penyangga" yang menahan eskalasi konflik. Meskipun UNIFIL tidak bisa melakukan konfrontasi secara langsung, mereka menjadi sarana diplomasi dan pemantauan terhadap pelanggaran yang terjadi sebagai sumber informasi penting bagi komunitas internasional. Sehingga meniadakan UNIFIL justru akan mempercepat eskalasi kekerasan yang terjadi jika tidak adanya pihak ketiga sebagai sebuah *buffer*. Pentingnya UNIFIL bukan terletak pada keberhasilan menghentikan konflik, tetapi pada fungsinya sebagai penstabil situasi dan penjaga kanal diplomatik di tengah situasi yang sangat sensitif.

KESIMPULAN DAN SARAN

United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) merupakan misi perdamaian PBB yang telah aktif sejak 1978 untuk menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Lebanon selatan, khususnya sepanjang *Blue Line* antara Lebanon dan Israel. UNIFIL dimandatkan oleh DK PBB untuk memantau dan menjaga Garis Biru yang merupakan garis penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon, memastikan agar wilayah tersebut tidak menjadi daerah konflik sesuai mandat 1701. Namun, perdamaian masih belum sepenuhnya tercapai dikarenakan akibat keterbatasan dari mandat yang diberikan. Meskipun dengan tantangan ini, UNIFIL masih berada di wilayah Garis Biru dan terus berusaha mempertahankan mandat 1701, dibantu oleh PBB, melalui negosiasi dan observasi pergerakan IDF dan Hizbullah.

Perlu diingat bahwa keberadaan UNIFIL di Lebanon Selatan tidak sepenuhnya gagal, kehadiran mereka telah mencegah terjadinya perang skala besar antara pihak yang berkonflik. Mereka telah menjadi sarana komunikasi dan informasi bagi PBB dan masyarakat internasional dalam mengetahui situasi di wilayah tersebut untuk menentukan tindakan yang perlu diambil. Tetapi keterbatasan ruang untuk UNIFIL bergerak masih perlu di evaluasi. Masyarakat internasional harus mengadopsi strategi bertingkat untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Perlu ada evaluasi ulang dan potensi penguatan mandat dengan perluasan kewenangan UNIFIL untuk

mencakup pemantauan aktif dan pencegahan peningkatan transparansi komunikasi antara semua pihak.

DAFTAR REFERENSI

- Caplan, R., Gledhill, J., & Meiske, M. (2024). Exploring the Impact of United Nations Peacekeeping Operations on the External Affairs of Host States. *European Journal of International Relations*, 30(3), 644–670. <https://doi.org/10.1177/13540661241247801>
- Fauziah Hamid Wada, et al. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Firdaus Sutan Mamad, F. S., Putra, J. S., Saaulia, R., & Adnis, S. (2020). Yasser Arafat Dan Konflik Palestina-Israel (Tinjauan Sejarah). *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.15548/khazanah.v10i1.265>
- Galtung, J. (1976). Three realistic approaches to peace: peacekeeping, peacemaking, peacebuilding. In *UNESCO Digital Library* (Vol. 26, pp. 103, 108, 110-112).
- OIOS. (2024). Outcome Evaluation of the Support Provided by the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) for the Establishment of a Stable and Secure Environment and the Extension of the State Authority in Southern Lebanon. United Nations Evaluation Group. www.unevaluation.org/member_publications/outcome-evaluation-support-provided-united-nations-interim-force-lebanon-unifil
- UN Security Council. (1978). Resolution 425 (1978).
- UN Security Council. (1978). Resolution 426 (1978).
- UN Security Council. (2006). Resolution 1701 (2006).
- UN Security Council. (2024). Resolution 2749 (2024).
- UNIFIL. (2025). FAQs. <https://unifil.unmissions.org/faqs>
- United Nations Department of Public Information. (1990). *The Blue Helmets: A review of United Nations peace-keeping*. United Nations Digital Library.
- Webel, C., & Galtung, J. (2010). *Handbook of Peace and Conflict Studies*. Routledge.
- Welsh, J., & Zahar, M.-J. (2025). What Future for Peace Operations? *Ethics & International Affairs*, 38(4), 1–14. <https://doi.org/10.1017/s0892679425000012>
- Widyoseno, B. (2024). Eektivitas Peran United Nations Interm Force in Lebanon dalam Penyelesaian Konflik Israel Hizbullah pada Tahun 2023. *Diplomacy and Global Security Journal*, 1(1), 517–531. <https://doi.org/10.36859/dgsj.v1i1.2899>